

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang semakin pesat dan canggih telah membawa dampak yang sangat besar khususnya dibidang informasi dan merupakan jawaban tepat dalam mengolah data pegawai, oleh karena itu tidak mustahil teknologi informasi banyak digunakan diberbagai macam perusahaan swasta maupun pemerintah. Perkembangan teknologi informasi tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan atau acuan dasar dalam pengambilan keputusan. Karena informasi merupakan katalisator yang sangat dibutuhkan dalam melakukan beberapa tindakan yang memerlukan respon terhadap sesuatu hal.

Sistem informasi adalah suatu sistem dalam organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, member sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan. Pengguna perangkat komputer sebagai perangkat pendukung manajemen dan pengelolaan data adalah sangat tepat dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas data, dengan demikian penggunaan perangkat komputer dalam setiap informasi sangat mendukung sistem pengambilan keputusan.

Seiring dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia secara tidak langsung membutuhkan sebuah sistem informasi dalam segala urusan pemerintahan sebagai sebuah wadah penyampaian informasi baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah maupun penyajian informasi yang dikemas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang ada. Sistem informasi kini menjadi suatu media penyampaian yang sangat mengedepankan

prinsip efektif dan efisien yang secara tidak langsung mendukung percepatan pembangunan dalam segala bidang.

Pada Instansi Pemerintah, khususnya Pemda Kabupaten Bangka Selatan. Sistem pengolahan tehnik informasi atau sistem informasi sangat dibutuhkan dengan sistem yang bisa mengendalikan pelaksanaan kegiatan khususnya pada pelayanan kepegawaian salah satunya pelayanan pembuatan kartu pegawai, pembuatan kartu istri, pembuatan kartu suami, dan pembuatan kartu taspen sesuai dengan dasar hukum:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian;
- b. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1973 tentang Pendaftaran Ulang PNS;
- c. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BAKN Nomor 217 Tahun 1974 dan Nomor 069//KEP/1974 Tanggal 16 November 1974 tentang Kartu PNS Bagi PNS Daerah;
- d. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1975 Tanggal 9 Januari 1975 tentang Petunjuk Permintaan, Penetapan & Penggunaan Nomor Induk PNS dan Kartu PNS;
- e. Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil.

Sebelum berkembangnya teknologi informasi usulan pembuatan kartu bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berlangsung dengan pemrosesan secara manual yang masih menggunakan aplikasi *Ms. Office*. Seluruh kegiatan pengajuan usulan pembuatan kartu bagi PNS masih belum terkomputerisasi sehingga munculnya berbagai macam persoalan. Sulitnya untuk mengetahui rekap data pengajuan usulan pembuatan kartu bagi PNS yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Banyaknya ditemukan kerangkapan data PNS yang mengaju usulan pembuatan kartu. Dengan berkembangnya teknologi informasi maka pengajuan usulan pembuatan kartu bagi PNS tersebut menuntut sebuah pengolahan data yang sistematis dan struktur dengan penyajian menggunakan sistem teknologi informasi.

Mengingat banyaknya jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang ada di Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan maka pengajuan usulan pembuatan kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, dan kartu taspem harus diberikan tepat waktu dengan perhitungan yang benar, untuk itu diperlukan suatu sistem pengolahan data yang efisien dan efektif. Dapat dibayangkan betapa kurang efektif dan efesiennya pencatatan pengajuan usulan pembuatan kartu bagi PNS jika dilakukan secara manual hal ini akan menghabiskan waktu pekerjaan pada Bidang Informasi dan Kesejahteraan Pegawai.

Dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi, pengajuan usulan pembuatan kartu bagi PNS dapat meminimalisir segala bentuk kesalahan dalam membuat rekap data PNS yang telah melakukan pengajuan usulan pembuatan kartu yang dilakukan setiap satu tahun sekali

Dengan diterapkannya sistem yang terkomputerisasi dalam pengajuan usulan pembuatan kartu bagi PNS menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia atau sumber daya aparatur oleh pegawai yang membawahi atau menangani dalam pemrosesan data tersebut, sehingga para Pegawai Negeri Sipil dapat menerima haknya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Berdasar pada uraian latar belakang di atas penyusun tertarik untuk membuat sistem pengajuan usulan pembuatan kartu bagi PNS pada Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Bangka Selatan serta menuangkan hasilnya dalam bentuk Skripsi dengan judul **“PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PROSES PENGUSULAN PEMBUATAN KARTU PEGAWAI, KARTU ISTRI, KARTU SUAMI, DAN KARTU TASPEN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN”**.

1.2 Perumusan Masalah

Pembuatan kartu pegawai adalah kartu identitas yang diberikan kepada mereka yang telah berstatus sebagai PNS dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepada pemegang bahwa pemegangnya adalah seorang PNS. Kartu istri, dan kartu suami merupakan kartu identitas isteri/suami sah Pegawai Negeri Sipil,

dan kartu taspen bagi PNS digunakan sebagai bukti keanggotan PNS dalam taspen.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana melakukan pendataan PNS yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah melakukan pengajuan usulan pembuatan kartu agar tidak adanya kerangkapan data?
- b. Bagaimana mengetahui rekap data PNS yang telah melakukan pembuatan kartu setiap tahunnya dengan cepat dan mudah?
- c. Bagaimana membuat laporan dengan cepat dan mudah dalam pembuatan kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, dan kartu taspen sebagai informasi yang harus disampaikan kepada Kepala Badan?

1.3 Batasan Masalah

Agar dalam penelitian dan pembuatan sistem yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk skripsi tidak terlalu meluas, maka penyusun memandang perlu untuk membuat suatu batasan masalah sebagai berikut :

- a. Pengajuan usulan pembuatan kartu bagi PNS sesuai surat surat edaran dari BKD Kabupaten Bangka Selatan.
- b. Penyerahan berkas usulan pembuatan kartu dan persyaratan oleh PNS kepada Bidang Informasi dan Kesejahteraan Pegawai BKD Kabupaten Bangka Selatan.
- c. Pendataan PNS yang telah mengajukan usulan pembuatan kartu
- d. Penyerahan Berkas pengajuan pembuatan kartu pegawai, kartu suami, dan kartu istri PNS kepada BKN Regional 7 dan penyerahan kartu taspen kepada kantor Taspen.
- e. Penyerahan kartu oleh Bagian Informasi dan Kesejahteraan pegawai BKD kepada PNS sesuai edaran dari Kepala Badan.
- f. Pembuatan Laporan rekap data PNS yang telah melakukan pembuatan kartu pegawai.

- g. Pembuatan Laporan rekap data PNS yang telah melakukan pembuatan kartu istri.
- h. Pembuatan Laporan rekap data PNS yang telah melakukan pembuatan kartu Suami.
- i. Pembuatan Laporan rekap data PNS yang telah melakukan pembuatan kartu taspen.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kerangka teoritis yang digunakan oleh penulis untuk menganalisa, mengerjakan/mengatasi masalah yang dihadapi. Beberapa metode yang penulis lakukan untuk memperoleh data atau informasi yang dilakukan pada penyusunan skripsi ini adalah :

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Didalam pengumpulan data penulis akan melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1) Observasi

Penyusun melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh informasi tentang sistem yang digunakan sebelumnya dan apa yang diperlukan demi kemudahan mendapatkan data dengan cepat.

2) Wawancara

Penyusun menanyakan langsung pada pegawai, khususnya pada Bidang Informasi dan Kesejahteraan Pegawai untuk memperoleh data dan kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam membuat sebuah sistem informasi proses pengusulan pembuatan kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, dan kartu taspen.

3) Metode Kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara dibantu buku-buku (dari perpustakaan) dan juga didapatkan melalui media internet yang berhubungan dengan laporan penelitian ini.

1.4.2 Metode Analisis

Ada beberapa tahapan dalam metode analisis pembuatan penelitian ini antara lain:

- a. Survey atas sistem yang sedang berjalan
- b. Analisis terhadap temuan survey
- c. Identifikasi kebutuhan informasi

1.4.3 Metode Perancangan

Ada beberapa metode perancangan dengan *Unified Modeling Language* adalah :

- a. Merancang sistem baru sesuai dengan identifikasi kebutuhan
- b. Merancang spesifikasi proses
- c. Merancang basis data dengan *Entity Relationship Diagram*
- d. Merancang tampilan antar muka sistem
- e. Merancang dokumen masukan dan dokumen keluaran sistem usulan
- f. Merancang aplikasi pemrograman visual studio 2008

1.4.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempermudah pengolahan data pegawai dengan membuat, menerapkan dan mengaplikasikan dalam sebuah sistem informasi pada dengan obyek penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan Subyeknya adalah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten Bangka Selatan secara efektif dan efisien.

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendataan PNS yang telah mengajukan usulan pembuatan kartu pada Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan dapat tersimpan dalam satu *file database* yang dapat dengan mudah diambil kembali datanya untuk dilihat atau digunakan kapan saja.
- b. Mempermudah penyajian informasi pengajuan usulan pembuatan kartu bagi PNS yang terkomputerisasi sehingga tidak ada kerangkapan data PNS yang telah mengajukan pembuatan kartu,

- c. Memberikan kemudahan dalam pembuatan laporan pembuatan kartu pegawai, kartu istri/suami, dan kartu taspen dengan menggunakan sistem yang telah terkomputerisasi.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Didalam sistematika penulisan ini akan memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai penyusunan laporan penelitian maka pembahasannya akan dibagi lagi menjadi lima bab dibawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan dalam laporan penelitian yang dibuat ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan penjelasan tentang teori umum, karakteristik sistem, klasifikasi sistem, konsep informasi, konsep dasar sistem informasi, komponen pengembangan sistem, metodologi pengembangan sistem, perancangan sistem, metode iterasi dimana setiap tahap pekerjaan dapat dikerjakan secara berulang– ulang, pemodelan proses, pemodelan data, ERD (*Entity Relationship Diagram*), bagan alir, teknologi basis data, teori khusus, teori aplikasi. Selain itu bab landasan teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori – teori yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail.

BAB III PENGELOLAAN PROYEK

Bab ini berisi PEP (*Project Execution Plan*) yang berisi objektif proyek, identifikasi stakeholders, identifikasi *deliverables*, penjadwalan proyek (yang berisi : *work breakdown structure*, *milestone*, jadwal proyek), RAB (Rencana Anggaran Biaya), Struktur

Tim Proyek berupa table RAM (*Responsible Assignment Matriks*) dan skema/diagram struktur, analisa resiko (*project risk*) dan *meeting plan*.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Berisi antara lain : struktur organisasi, jabaran tugas dan wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat mengemukakan kembali masalah penelitian (mampu menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah), menyimpulkan bukti-bukti yang diperoleh dan akhirnya menarik kesimpulan apakah hasil yang didapat (dikerjakan), layak untuk digunakan (diimplementasikan). Saran merupakan jalan keluar untuk mengatasi masalah (kelemahan yang ada), saran yang diberikan tidak terlepas dari ruang lingkup penelitian (untuk objek penelitian maupun pembaca yang akan mengembangkan hasil penelitian).